



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN**

**Rapat
Koordinasi
Pengawasan**

2021



EVALUASI 2020 & STRATEGI PENGAWASAN 2021

INSPEKTORAT JENDERAL

Selasa, 13 April 2021

GAMBARAN UMUM 2020



15.926 personil



85 satker eselon II pusat dan 196 satker UPT



Asset total senilai **Rp. 17,21 triliun** atau menyusut/terkoreksi 8% YoY



Biaya pegawai & operasional (*overhead costs*) **Rp 2,25 triliun**



Belanja program dan kegiatan sebesar **Rp 4,94 triliun** (situasi Darurat Pandemi)



Menarik PNBPs sebesar **Rp 5,06 triliun** atau turun 15% YoY

CORE BUSINESS & INDIKATOR KINERJA UTAMA

PILAR LINGKUNGAN

- Peningkatan IKLH
- Penurunan emisi GRK Hutan & limbah
- Penurunan laju deforestasi
- Peningkatan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah
- Pemulihan DAS (lahan kritis)
- Proteksi lahan HCV

PILAR EKONOMI

- Kontribusi PDB dari sektor LHK
- Peningkatan nilai ekspor hasil hutan, TSL dan Bioprospecting
- Peningkatan PNBPN LHK

PILAR SOSIAL

- Penetapan Kawasan hutan
- Pencapaian target TORA
- Peningkatan luas Kawasan hutan yang dikelola masyarakat

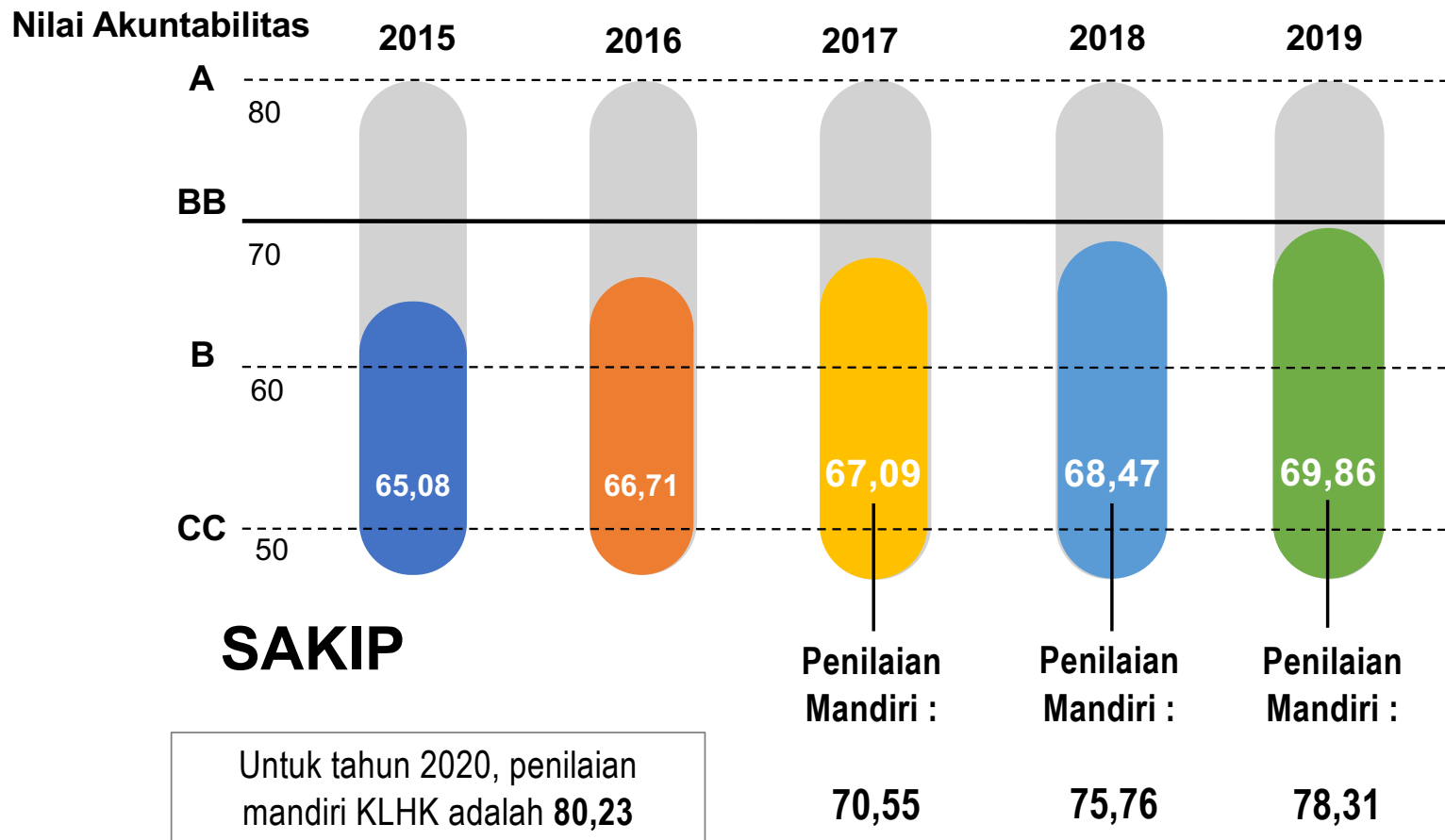
PILAR TATA KELOLA

- Peningkatan Indeks Tata Kelola Hutan
- Penanganan penegakan hukum
- Peningkatan Indeks SPBE
- Implementasi inovasi litbang
- Peningkatan Indeks SDM
- Peningkatan Indeks RB
- Peningkatan Level Maturitas SPIP
- Laporan Keuangan WTP

CATATAN PENTING :

Beberapa IKU masih belum ter-*develop* dengan baik, sehingga ukuran kinerjanya belum ada atau menggunakan variabel lain yang tersedia

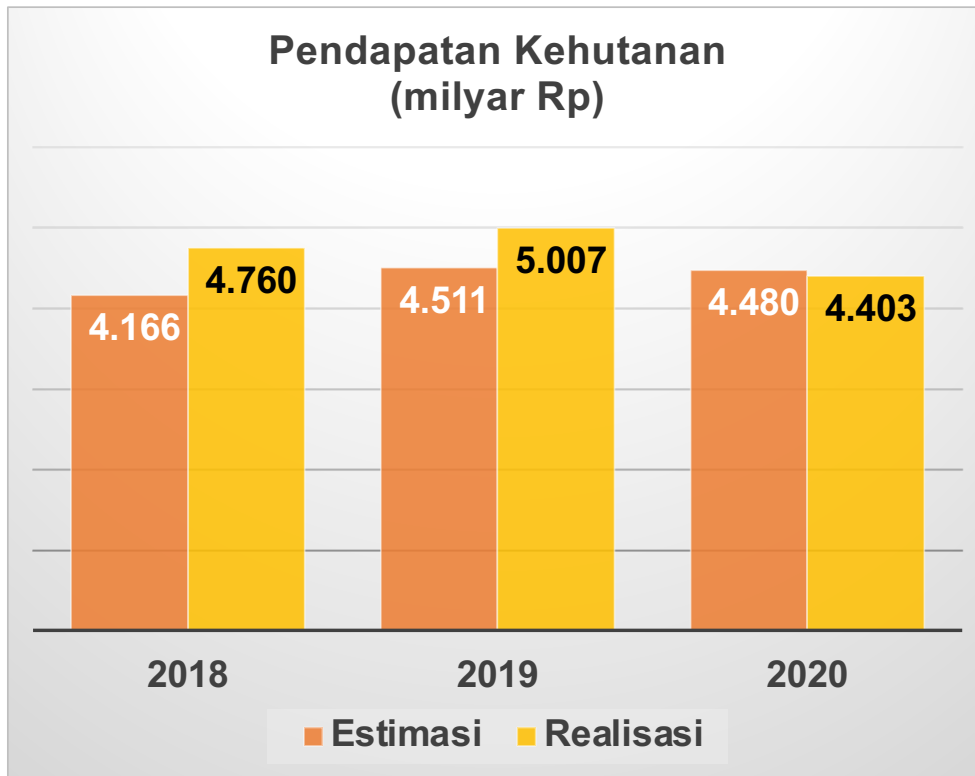
PROFIL AKUNTABILITAS KINERJA



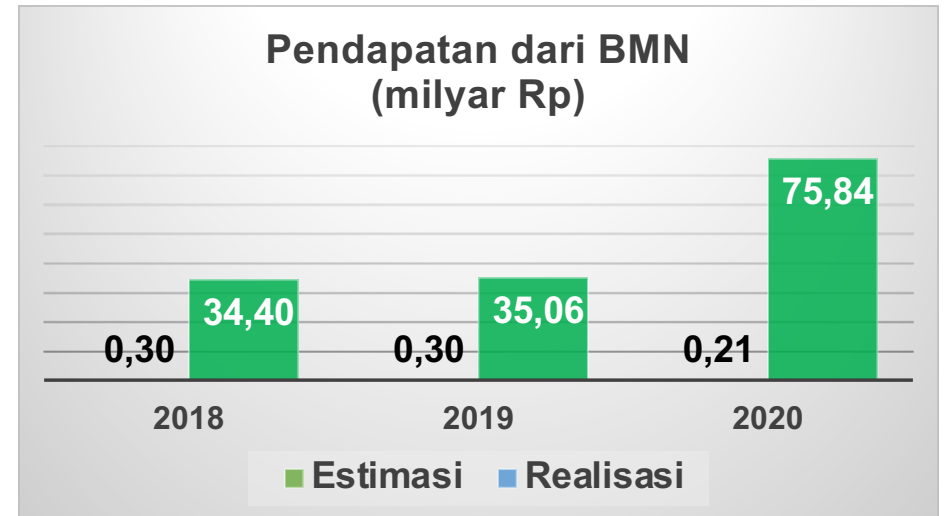
Catatan :

- Kecenderungan “*over-estimate*” dalam menilai mandiri
- “Gap” terbesar terjadi di elemen pengukuran kinerja dan capaian kinerja
- Perbaikan terjadi pada elemen pelaporan kinerja
- Stagnasi terjadi pada elemen perencanaan kinerja

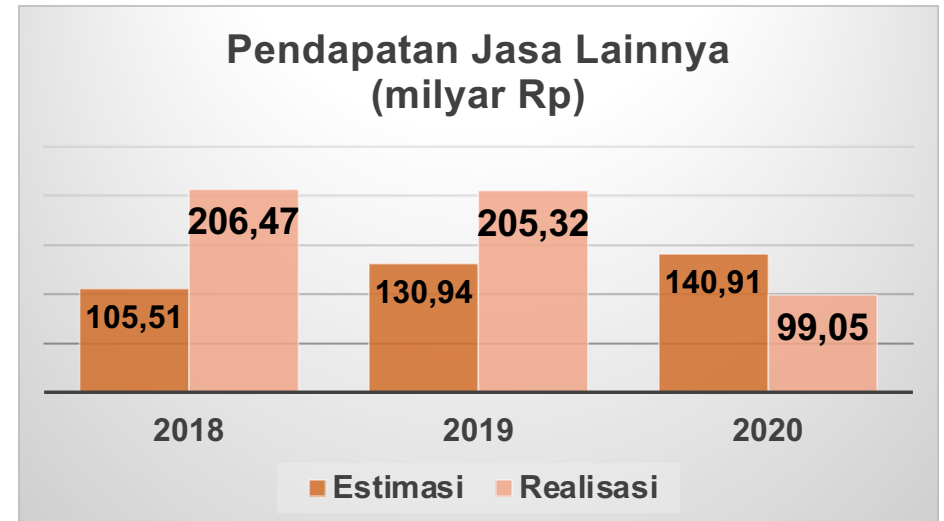
PROFIL PENDAPATAN



- Pendapatan kehutanan berasal dari DR (32%), PSDH (23%), Iuran IUPH (2%), Penggunaan Kawasan Diluar Kehutanan (43%)



- Pendapatan BMN dari sewa, jual, dan pemindahtanganan



- Pendapatan wisata alam, iuran, dan jasa2 lainnya

PROFIL PENDAPATAN - 2

1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Secara Umum

Diukur secara umum melalui 3 (tiga) kriteria :

- Kepatuhan dan ketepatan penarikan
- Minimnya risiko kerugian akibat *undervalue*
- Minimnya risiko *fraud*, akuntabilitas yang rendah, dan potensi korupsi

Highlights :

- a. Pertumbuhan PNBPN LHK yang kuat dan sehat mendorong urgensi penilaian kembali potensi riil pendapatan dan penyesuaian target penarikan
- b. Fokus pengelolaan risiko harus lebih banyak ditujukan pada pembenahan *baseline* informasi dan akuntabilitas inventarisasi data
- c. Manajemen risiko harus mempertimbangkan *red flags* aliran proses penarikan untuk menjaga integritas dan meminimalkan kebocoran

PROFIL PENDAPATAN - 3

2. Pendapatan Kehutanan

Highlights :

- a. Mendapat catatan BPK untuk memperbaiki estimasi, akurasi data potensi penarikan, dan ketaatan pembayaran karena dinilai masih *under-value*

3. Pendapatan dari Jasa Lainnya

Highlights :

- a. Pendapatan ini didominasi dari kontribusi KSDAE namun memiliki tren penurunan walaupun estimasi terus meningkat

4. Pendapatan dari BMN

Highlights :

- a. Pendapatan ini didominasi dari sewa tanah, gedung dan bangunan yang mengalami pertumbuhan pesat hingga hampir 2 kali lipat yang mengimplikasikan besarnya potensi pendapatan apabila pengelolaannya makin tertib dan profesional

PROFIL EFISIENSI

1. Efisiensi Operasional

Diukur secara umum melalui 2 (dua) kriteria :

- Rasio biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan operasional organisasi
- Tingkat kerampingan proses bisnis dan rendahnya *redundancy* tusi

Highlights :

- a. Belanja pegawai dan operasional terbesar adalah pada Ditjen KSDAE, yaitu \pm Rp.1,03 trilyun atau 44% dari keseluruhan belanja pegawai dan operasional KLHK atau secara kasar menjadikan *overhead cost* pengelolaan 27 juta ha Kawasan Konservasi senilai Rp. 38 – 64/ha
- b. Proses *streamlining* pelayanan perizinan berusaha menciutkan 52 jenis izin usaha/kegiatan menjadi 34 jenis perizinan berusaha

PROFIL EFISIENSI - 2

2. Return on Investment : Infrastruktur Digitalisasi, SDM

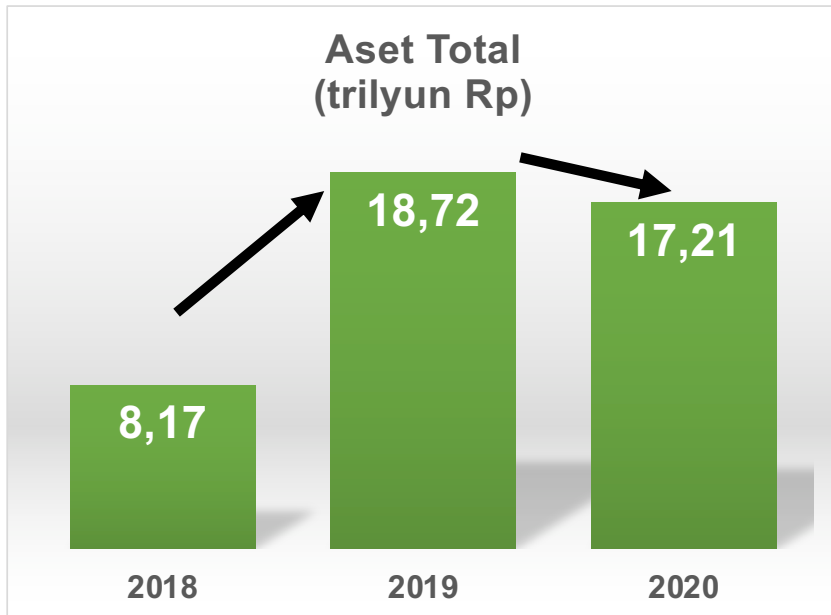
Diukur secara kasar melalui 2 (dua) kriteria :

- Transformasi operasi menuju otomatisasi, digitalisasi, dan *artificial intelligence* (Revolusi Industri 4.0) untuk menurunkan biaya operasional
- Penguatan sumberdaya manusia untuk meningkatkan produktivitas

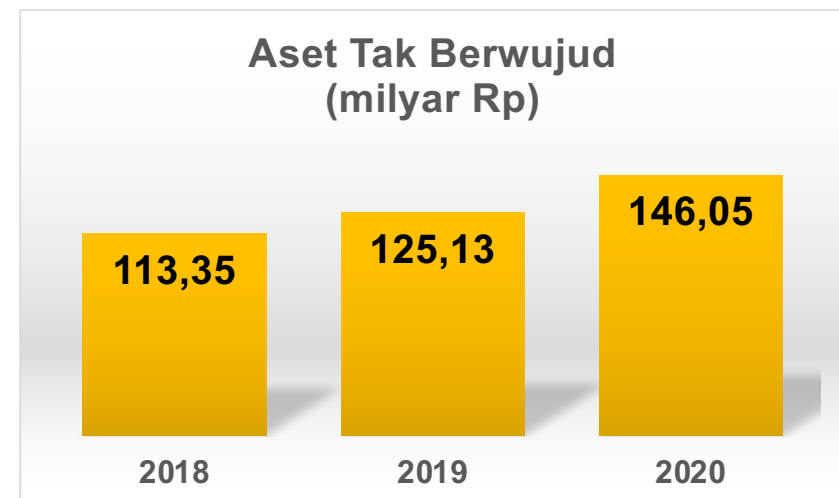
Highlights :

- a. Peringkat Indeks SPBE KLHK adalah terbaik ke-3, namun secara nasional indeks SPBE Pemerintah Indonesia masih tertinggal (skor “CUKUP”) atau baru “lulus” di level otomatisasi dan digitalisasi administrasi.
- b. Infrastruktur pemantauan dan inventarisasi berbasis digital/real-time masih belum memenuhi jumlah minimum memadai (*minimum critical mass*)
- c. Penataan jabatan fungsional membutuhkan percepatan

PROFIL ASET



- Lonjakan nilai aset terutama karena revaluasi khususnya pada aset Tanah, Gedung & Bangunan serta Peralatan & Mesin
- Komponen penyusutan penting adalah banyak aset rusak/hilang
- Kemitraan pihak ketiga adalah kerjasama pemanfaatan BMN atau aset/hak usaha organisasi
- Aset tak berwujud adalah aset dalam bentuk *software/system*, hak cipta/intelektual maupun hasil penelitian



PROFIL ASET - 2

1. Undervalue Aset BMN KLHK mengimplikasikan Kerugian

Sejarah penilaian aset BMN yang terlalu rendah mengimplikasikan :

- Besarnya kemungkinan terjadi kerugian negara
- Cerminan kurangnya optimalisasi pemanfaatan, pemeliharaan, dan peningkatan nilai manfaat
- Besarnya potensi pemborosan akibat asset yang “tidak bekerja”, tidak efisien digunakan dan kurang memberikan nilai tambah kepada organisasi maupun masyarakat

Highlights :

- a. Tukar menukar tanah dengan BUMN, kerjasama pemanfaatan tanah untuk infrastruktur, pendapatan atas pemanfaatan bangunan Gedung
- b. Tertib administrasi BMN yang belum optimal dan bahkan TL belum selesai
- c. Harus ada penertiban rencana pengajuan belanja modal ke depan

PROFIL ASET - 3

2. Optimalisasi Value Manfaat Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Highlights :

- a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga berpotensi meningkatkan nilai manfaat asset yang *under-value*, "diam"/terbengkalai, atau tidak ekonomis untuk dioperasikan sendiri sehingga pertumbuhannya perlu didorong secara professional
- b. Kemitraan yang tertib dan terkelola baik juga membuka potensi penyelesaian konflik atas asset dimaksud

3. Optimalisasi Aset Tak Berwujud

Highlights :

- a. Pertumbuhan nilai ATB menunjukkan adanya potensi kekayaan intelektual, informasi, pengetahuan maupun aplikasi teknologi yang dimiliki KLHK yang seharusnya dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin

PROFIL PENILAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

2018-2019

GEJALA 1 : PNBP

- Akurasi IPPKH
- Kurang bayar
- Ketidapatuhan/keterlambatan penyetoran
- Potensi PNBP yang belum teridentifikasi
- Selisih perhitungan dan penanganan piutang

GEJALA 2 : BELANJA RHL & PEMULIHAN

- Ketepatan rehabilitasi lahan kritis dan sangat kritis
- Ketepatan dan kualitas pekerjaan pemulihan (terutama gambut)

GEJALA 3 : ASET

- Aset rusak, hilang, belum berlabel, tidak diketahui pemiliknya
- Pencatatan ganda, penggunaan tidak tercatat, salah catat
- Penilaian asset tidak tepat

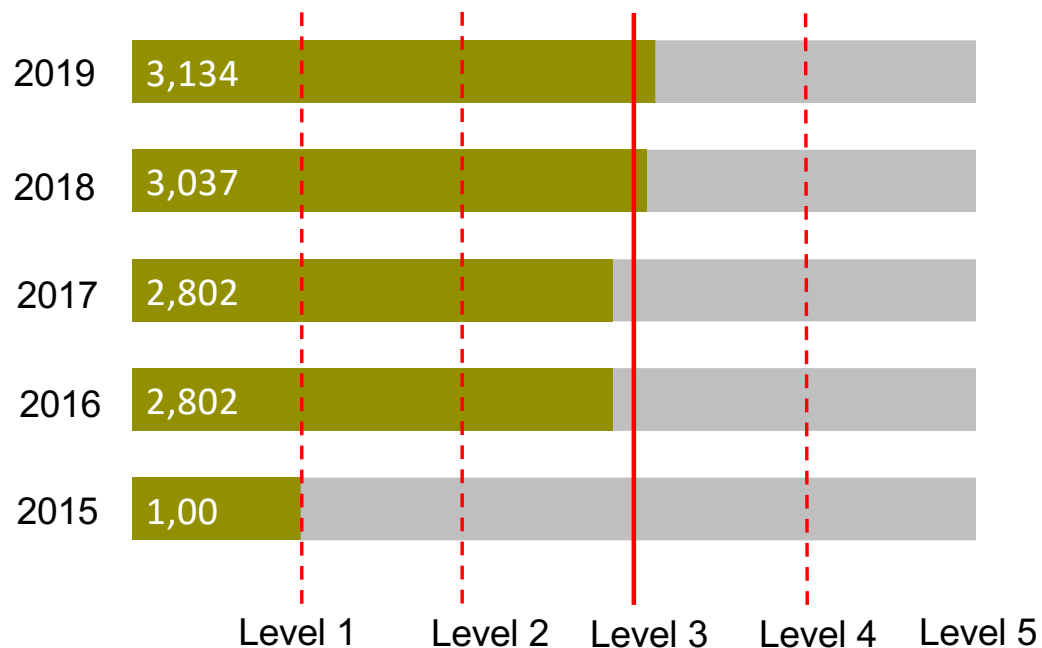
GEJALA 4 : BARANG UNTUK DISERAHKAN

- Penatausahaan barang lambat dan banyak kekurangan
- Progress penyerahan rendah
- Terjadi penumpukan pada saldo barang persediaan

**GEJALA 5 : KAPASITAS MONEV ATAS MANDAT YANG DIBERIKAN
(TERUTAMA PERIZINAN) BELUM MEMADAI**

PROFIL MATURITAS SPIP

TINGKAT MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPIP)



2020

No	Eselon I	QA Maturitas SPIP Thn 2019	PM Maturitas SPIP Thn 2020
*	Kementerian	3,1352	3,3727
1	Sekretariat Jenderal	3,1352	3,4705
2	Inspektorat Jenderal	3,2445	3,6568
3	Ditjen PKTL	3,2182	3,4182
4	Ditjen KSDAE	3,0977	3,3580
5	Ditjen PDASHL	3,1432	3,4182
6	Ditjen PHPL	3,2080	3,4307
7	Ditjen PPKL	3,1352	3,3580
8	Ditjen PSLB3	3,1352	3,5057
9	Ditjen PPI	3,1352	3,3352
10	Ditjen PSKL	3,2080	3,5966
11	Ditjen PHLHK	3,0977	3,3352
12	BPPSDM	3,1727	3,5830
13	BPPI	3,2080	3,7659

Penilaian mandiri tahun 2020 masih berada di angka 3,3

Seluruh Satker telah memenuhi syarat penyusunan Desain SPIP dan telah di upload secara online. Rata-rata Desain SPIP telah dinilai baik karena memenuhi persyaratan dasar (prosedur penyusunan dan format penulisan tetap), namun kualitasnya belum optimal.

PROFIL MATURITAS SPIP-2

1. Nilai Maturitas SPIP KLHK masih di angka 3,3 (hasil Penilaian Mandiri) atau "CUKUP". Sistem pengendalian sudah terbentuk, namun belum optimal.
2. Target peningkatan maturitas ke Level 4 dalam Renstra KLHK 2020-2024 adalah tahun 2023 dan harus didorong lebih cepat implementasinya.
3. Catatan optimalisasi SPIP : ***Dibutuhkan komitmen kuat pimpinan Satker dan pimpinan puncak dalam :***
 - a. Menjalankan fungsi monitoring dan *oversight* secara konsisten
 - b. Melakukan identifikasi risiko dengan baik, tajam, dan strategis
 - c. Menjaga konsistensi antara hasil identifikasi risiko dengan langkah-langkah pengendaliannya
 - d. Memperbaiki budaya kerja yang menekankan keterbukaan informasi dan sikap komunikatif yang pro-aktif

PROFIL KEPATUHAN

1. Pengadaan Barang dan Jasa

Highlights persoalan:

- a. Kelemahan perkiraan HPS dan Standar Biaya
- b. Risiko *fraud* proses pengadaan
- c. Kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian kualitas hasil
- d. Ketidaksesuaian pelaksanaan dengan aturan
- e. Keterlambatan/ketidakdisiplinan waktu
- f. Kelebihan pembayaran dan/atau pemborosan

2. Pemborosan Belanja untuk Rapat

Highlights persoalan :

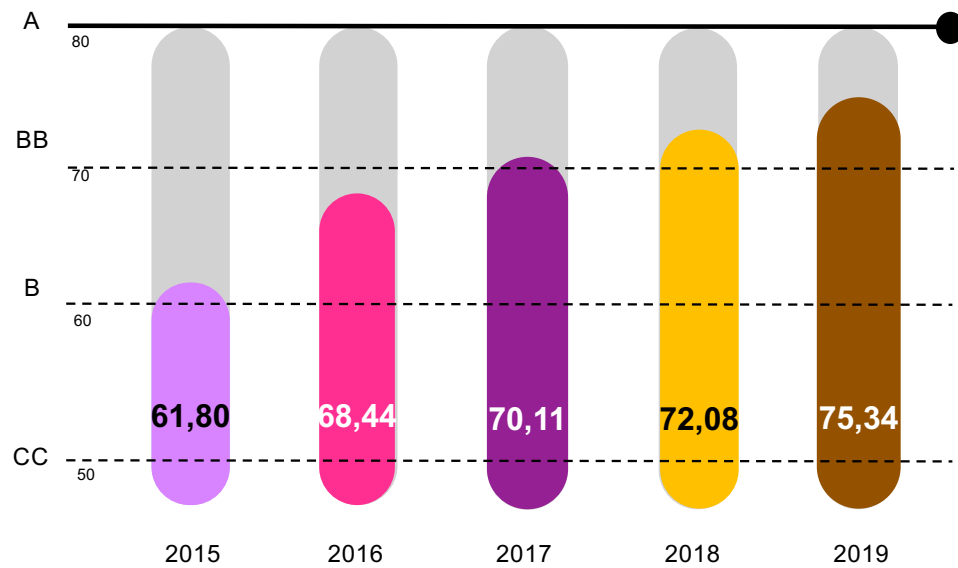
- a. Pemborosan atas rapat-rapat *fullboard* dan *fullday* dalam dan luar kota
- b. Pembayaran berlebihan pada honorarium rapat dan narasumber

POSISI KEMAJUAN REFORMASI BIROKRASI

2020

REFORMASI BIROKRASI

Nilai Kinerja Pelaksanaan



	Unit Kerja	Hasil Asesor Unit/Pusat	Hasil Reviu TPI	Gap Asesor dengan TPI	Bobot
1.	Setjen	TIDAK ADA	8,02	-	36,30
2.	Itjen	33,14	32,26	-0,88	36,30
3.	PKTL	35,10	31,93	-3,17	36,30
4.	PSKL	34,20	30,30	-3,9	36,30
5.	PHPL	34,11	33,52	-0,59	36,30
6.	PDASHL	36,30	27,64	-8,66	36,30
7.	KSDAE	30,37	31,27	0,9	36,30
8.	PPI	34,58	33,47	-1,11	36,30
9.	PPKL	30,32	29,72	-0,6	36,30
10.	PSLB3	32,52	24,38	-8,14	36,30
11.	PHLHK	32,76	27,32	-5,44	36,30
12.	BPPSDM	32,46	29,18	-3,28	36,30
13.	BLI	32,97	31,39	-1,58	36,30
14.	PUSAT	49,50	48,90	-0,6	60,00

- Penilaian mandiri KLHK untuk tahun 2020 diperkirakan akan menghasilkan skor sekitar **80 - 81,5**

REKOMENDASI REFORMASI BIROKRASI

Manajemen Perubahan

- Butuh *Roadmap*
- Perlu ada *Quick Wins*
 - Kuat dalam *Money*
- Kuat dalam strategi komunikasi
- Mengoptimalkan agen perubahan

Deregulasi Kebijakan

- Perampingan dan pemangkasan prosedur (*Streamlining*)
- Koordinasi lintas kewenangan, sektor, unit

Penataan Organisasi

- Pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional
- Perampingan organisasi

Penataan Tata Laksana

- Perampingan proses bisnis
- Keterbukaan dan Kerjasama
- Transformasi digital /penerapan full *e-gov*

Penataan SDM

- Penyelesaian peta jabatan
- Reviu ulang kelas jabatan
- Penerapan manajemen talenta
- Melakukan pengembangan kompetensi diikuti *assessment* secara periodik

Akuntabilitas

- Terutama perbaikan perencanaan dan pengukuran kinerja

Penguatan Pengawasan

- Manajemen risiko *fraud* dan konflik kepentingan
- Penerapan WBK/WBBM
- Pengembangan sistem penanganan pengaduan

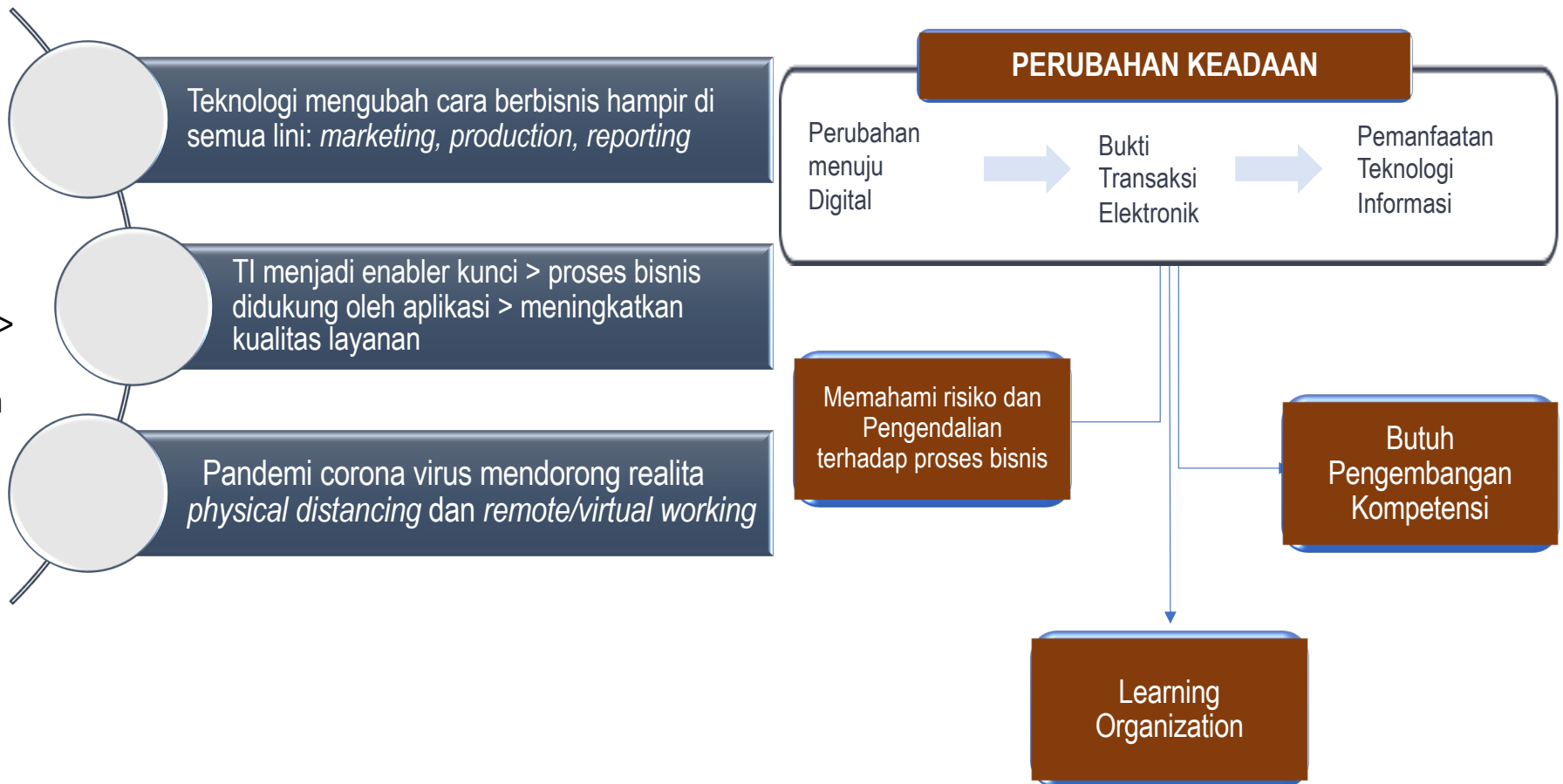
Pelayanan Publik

- Peningkatan standar
- Transformasi digital
- Pengembangan sistem penanganan pengaduan

PEMBELAJARAN PANDEMI COVID-19

a. Risiko baru yang memerlukan bentuk-bentuk pengendalian yang sesuai dengan system TI

b. Bukti audit dalam bentuk data elektronik > auditor perlu merubah cara pengumpulan dan analisis bukti oleh auditor



POTENSI RISIKO PENGELOLAAN ANGGARAN DAN ASET 2021



PENYERAAN ANGGARAN TIDAK MENCAPAI TARGET

Evaluasi perencanaan dan penyerapan anggaran secara ketat

PENYALURAN PEN TIDAK TEPAT SASARAN

Kesiapan data yang akurat dan Penetapan sasaran kegiatan disesuaikan dengan indikator/kriteria

"4 TEPAT" DALAM PBJ TIDAK TERCAPAI

Komitmen bersama dan pelaksanaan PBJ sesuai ketentuan

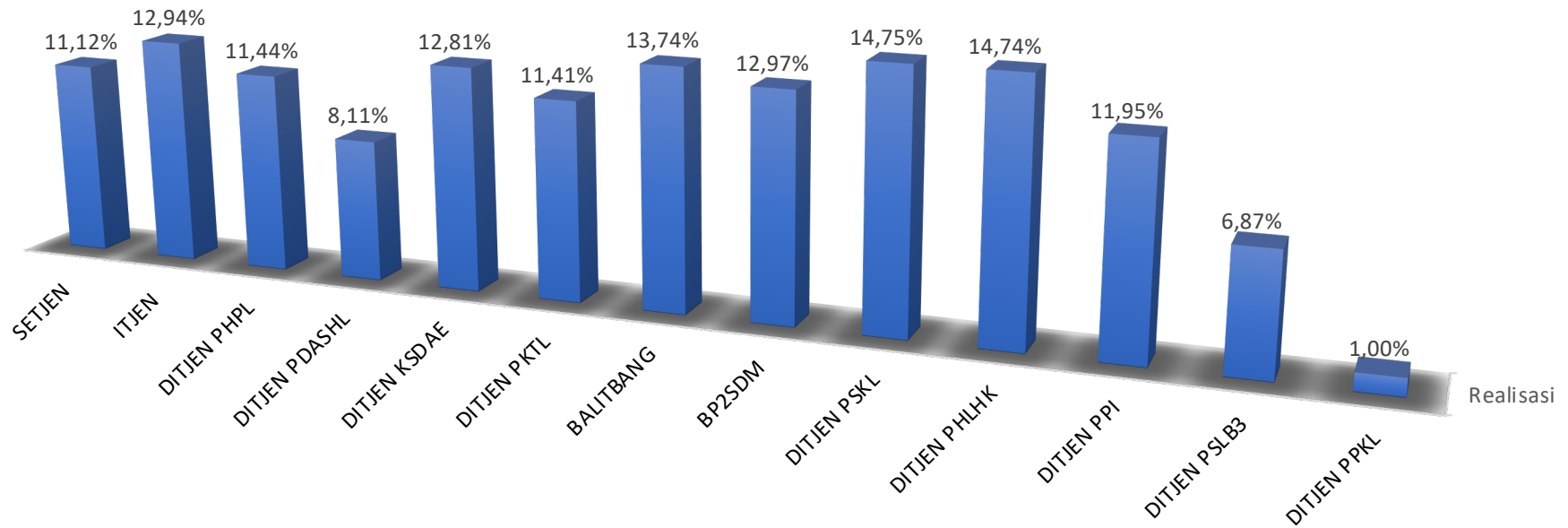
KEPATUHAN/KESEUAIAN PERTANGGTANGJAWABAN KEUANGAN

Komitmen bersama dalam tertib administrasi keuangan dan meningkatkan control internal

RISIKO PENYERAPAN ANGGARAN



REALISASI BELANJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I



RISIKO PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL



PERENCANAAN PROGRAM KURANG MEMADAI

01

Desain perencanaan PEN tidak didukung data yang akurat

HAMBATAN DAN ISU AKUNTABILITAS DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

- Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa tidak tepat
- Isu kewajaran harga
- Adminidrasi swakelola tidak tertib

03

02

Keselerasan Program Dan Sinergi Antar Eselon I Belum Optimal

Pelaksanaan PEN harus dipastikan berorientasi hasil saling terintegrasi dan saling mendukung

04

Data yang tidak akurat/tidak mutakhir

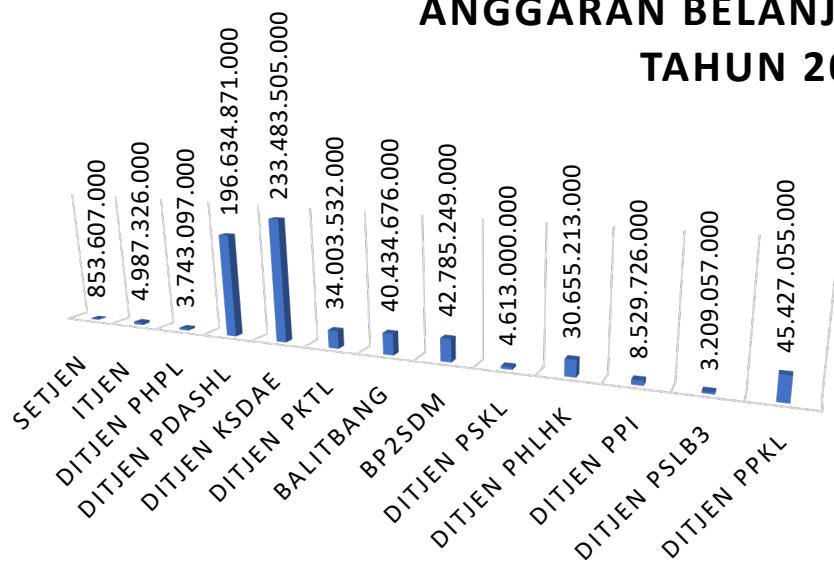
berdampak pada ketepatan perncanaan/penganggaran, ketepatan dan keberhasilan program



RISIKO PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA MODAL DAN PELAKSANAAN SBSN



ANGGARAN BELANJA MODAL (53) TAHUN 2021



1. Pembangunan Pusat Konservasi Satwa Kepulauan Maluku di Balai KSDA Maluku: 39,127 M
2. Pembangunan Pusat Konservasi Rusa di Balai TN Rawa Aopa Watumohai: 30,353 M
3. Pembangunan *Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA)* Taman Nasional Ujung Kulon: 72,667

29 % dari Anggaran Belanja 53 untuk **Pelaksanaan SBSN**

Proyek Pembangunan Komplek SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru: 15,302 M **(MYC – Lanjutan)**

Pembangunan Laboratorium Riset Sutera Alam Indonesia Bogor *Forest Science Park*: 24,446 M **(MYC – Lanjutan)**

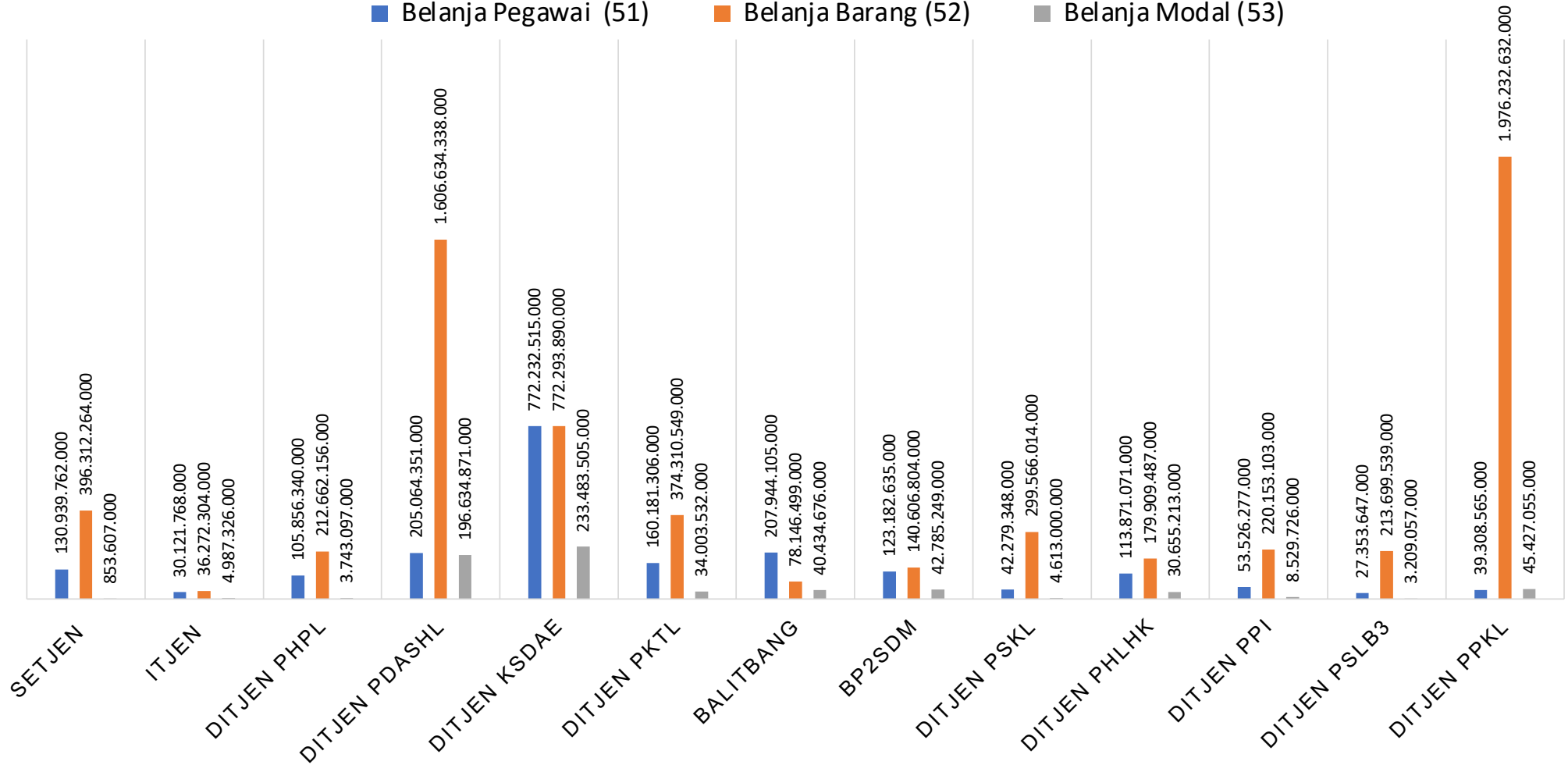
1. Usulan SBSN bersifat tahunan, belum ada masterplan.
2. Proses lelang terlambat dilaksanakan atau terjadi gagal lelang.
3. Lahan belum sepenuhnya siap atau belum clean n clear.
4. Terdapat relokasi, realokasi dan/atau perubahan ruang lingkup pekerjaan.
5. Persyaratan teknis dan/atau administrasi (missal AMDAL, ijin MYC revisi buka blokir DIPA) terlambat diproses.
6. Penyedia bermasalah dan/atau berkinerja tidak baik (tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, tidak sesuai spesifikasi teknis atau terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengns Kontrak).
7. Potensi Fraud

RISIKO PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BARANG

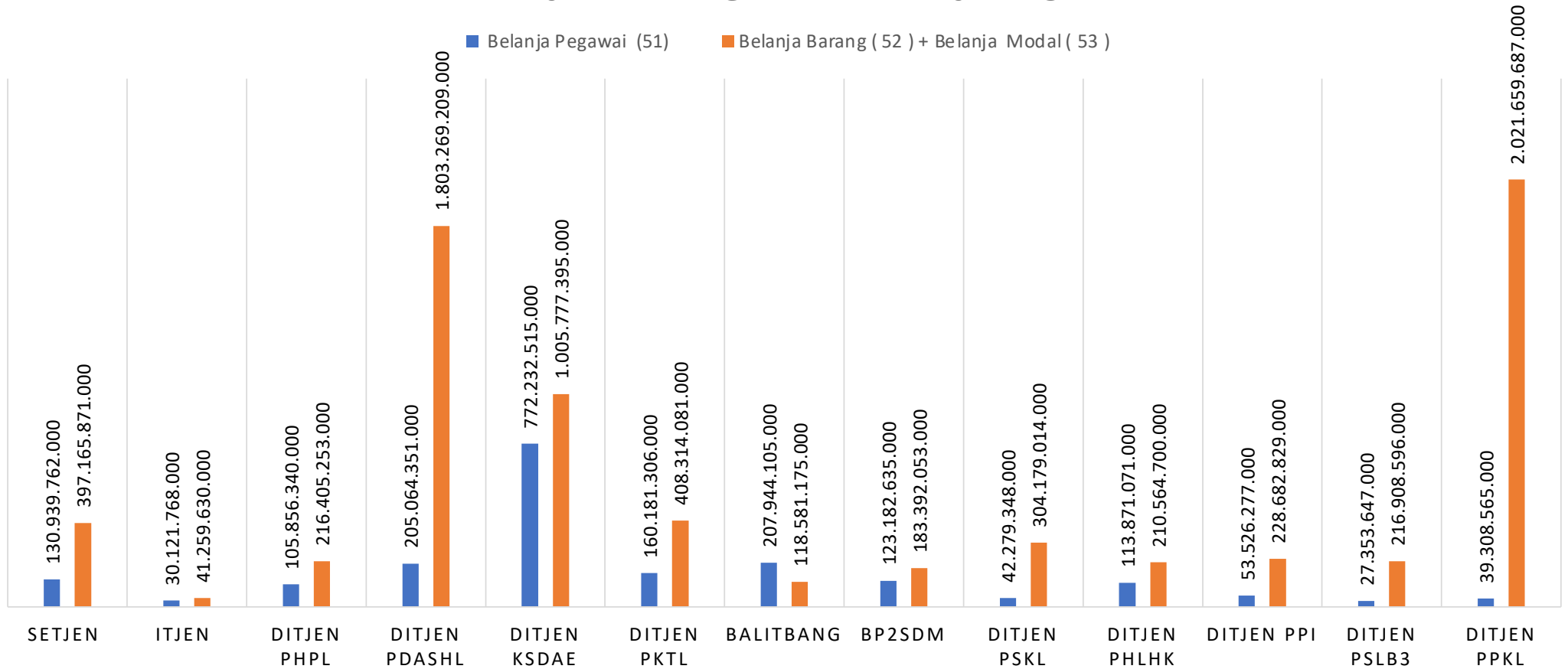


ANGGARAN BELANJA ESELON I

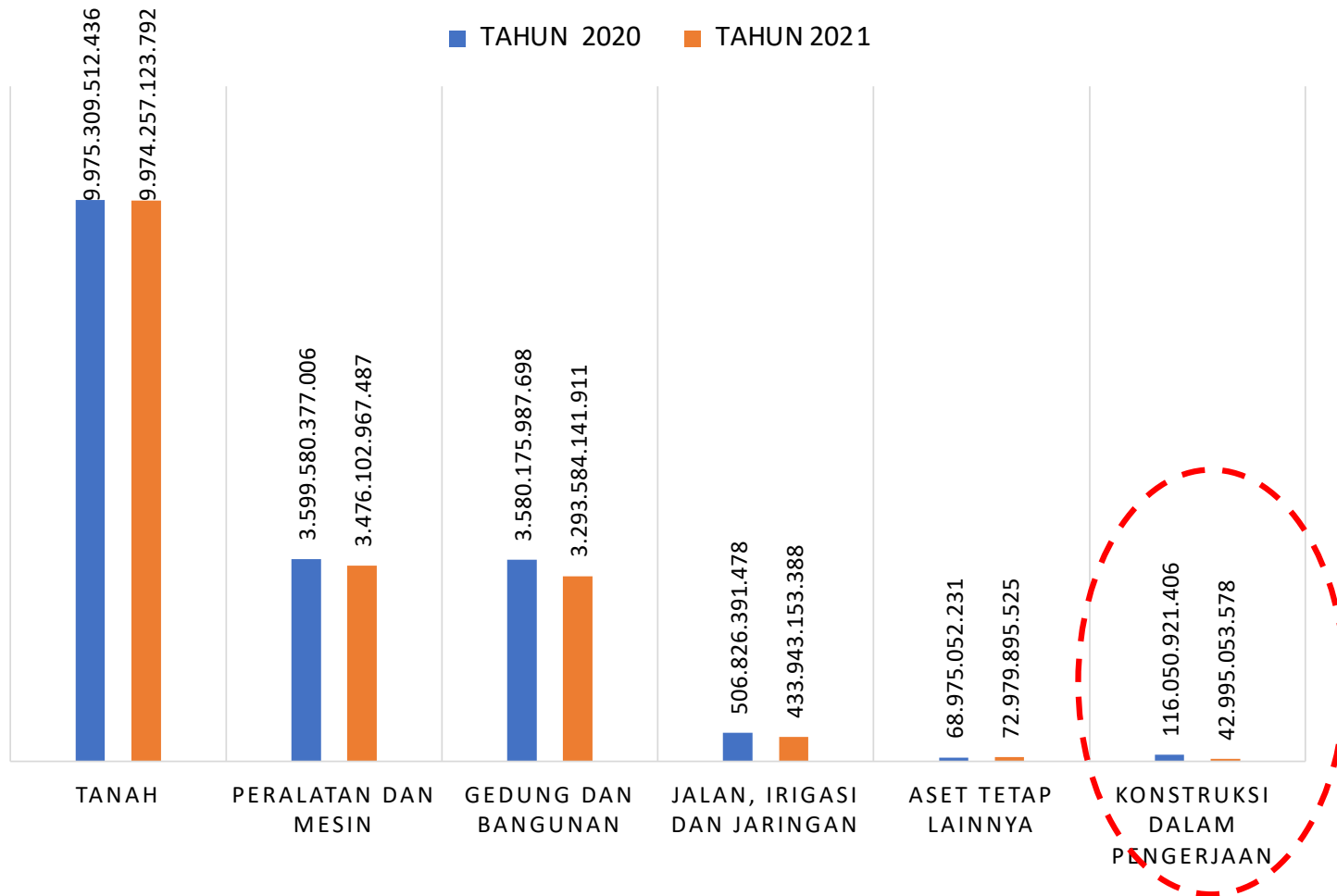
■ Belanja Pegawai (51) ■ Belanja Barang (52) ■ Belanja Modal (53)



GAMBARAN BEBAN KERJA BERDASAKAN ANGGARAN BELANJA PEGAWAI DENGAN BELANJA BARANG DAN BELANJA MODAL



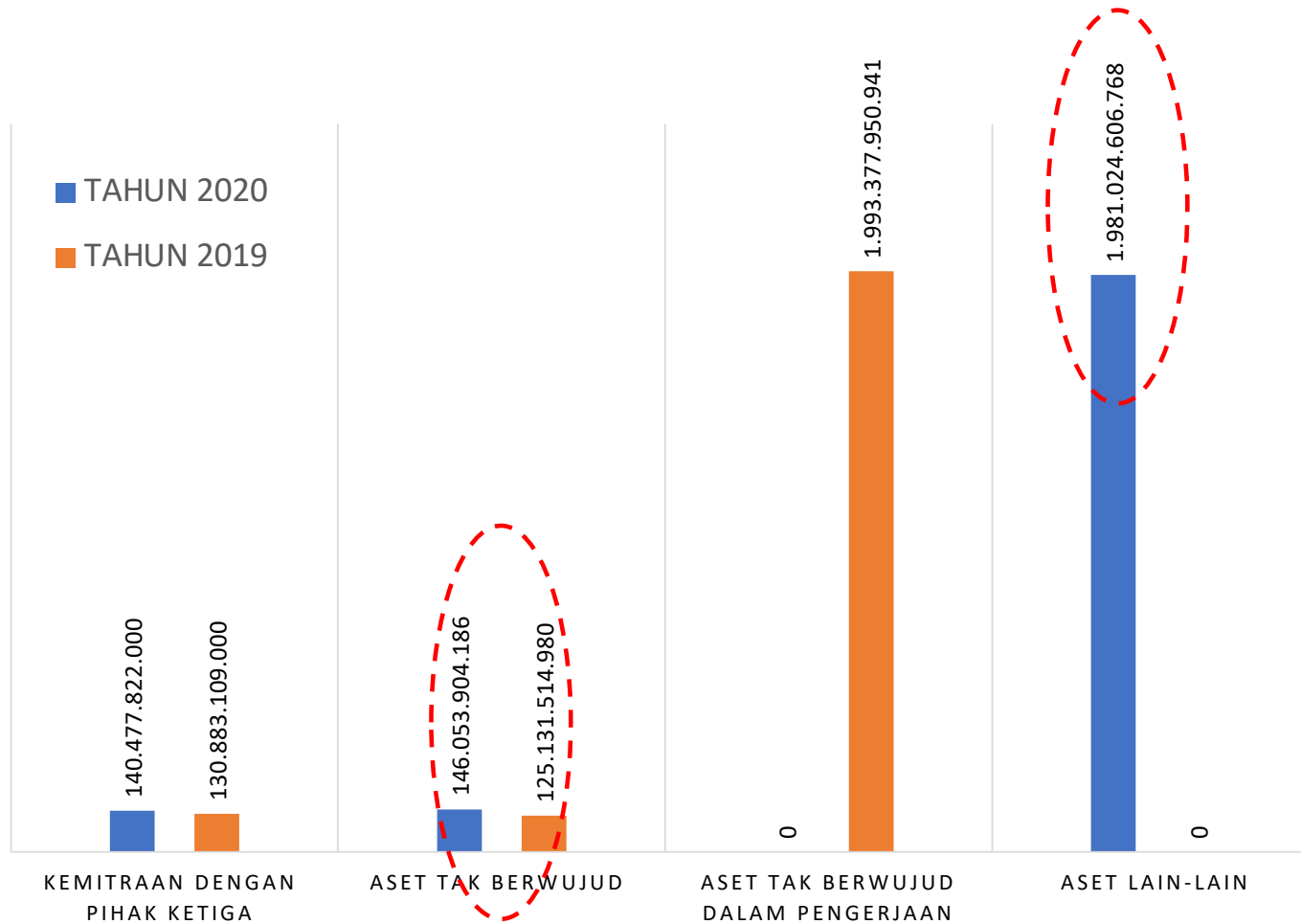
RISIKO PENGELOLAAN ASET TETAP KEMENTERIAN LHK



ANGGARAN BELANJA MODAL TAHUN 2021 SENILAI Rp649.359.914.000

1. Kelengkapan Dokumen Kepemilikan Tanah
2. Inventarisasi BMN dan Updating data di Aplikasi SIMAK dan SIMAN
3. Penghentian penggunaan dan usulkan penghapusan bagi BMN yang dalam kondisi Rusak Berat
4. Memproses Tindak Lanjut Aset KDP
5. Komitmen KPB terhadap Tertib Pengelolaan BMN

RISIKO PENGELOLAAN ASET LAINNYA KEMENTERIAN LHK



ANGGARAN BELANJA MODAL TAHUN 2021 SENILAI Rp649.359.914.000

1. Inventarisasi Aset Tak Berwujud dan Updating data di Aplikasi SIMAK dan SIMAN
2. Percepatan proses Penghapusan BMN di Tingkat UPT dan Tingkat Pusat

PROGRAM KERJA

PENGAWASAN 2021

1. Pelaksanaan kegiatan *assurance* (penjaminan kepercayaan) :
 - Audit kinerja berbasis risiko
 - Reviu dan evaluasi tematik, termasuk reviu *mandatory*
 - *Probity Audit*
 - Penjaminan tematik pro-aktif hasil *data analytic* berbasis digital
2. Penguatan SPI dan Manajemen Risiko
 - Pendampingan penguatan SPIP dan edukasi manajemen risiko
 - Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi, Maturitas SPIP dan SAKIP
3. Pengendalian Korupsi dan Risiko *Fraud*
 - a. Edukasi dan penilaian mandiri WBK/WBBM
 - b. Pengembangan *whistleblowing system*

PROGRAM KERJA PENGAWASAN

PENERAPAN UU NO. 11/2020

1. Penerapan PP No. 22/2021 memiliki 13 klaster proses bisnis dan 32 items tata kelola bertransisi yang harus diawasi
2. Penerapan PP No. 23/2021 memiliki 7 klaster proses bisnis dan 27 items tata kelola bertransisi yang harus diawasi
3. Penerapan PP No. 24/2021 memiliki 5 items tata kelola bertransisi yang harus diawasi
4. Fokus pengawasan jangka pendek adalah :
 - a. Ketepatan waktu dan kelengkapan NSPK operasional
 - b. Kelengkapan dan akurasi *baseline* data sebagai basis awal
 - c. Akuntabilitas proses-proses pengambilan keputusan di semua tahapan transisi maupun transformasi

TERIMA KASIH